



TAHUN 2021

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
PIDIE

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Setelah adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome). Pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Berdasarkan hal diatas maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie selaku instansi Pemerintah Kabupaten Pidie perlu menyusun Indikator Kinerja Utama sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Pidie.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan OPD sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Pidie yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026.
6. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Tahun 2017- 2022;
7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal untuk pengelolaan bidang yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, dengan 2 sub bagian,
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, dengan 3 seksi,
  - 1) Seksi Pemberdayaan Nelayan dan Kelembagaan;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Tempat Pendaratan Ikan;
  - 3) Seksi Pengembangan Usaha Nelayan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, dengan 3 seksi,
  - 1) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
  - 2) Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - 3) Seksi Pengembangan Budidaya.
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan 3 seksi,
  - 1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Perikanan;
  - 2) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  - 3) Seksi Akses Pasar dan Promosi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk lebih jelas Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie dapat dilihat pada skema berikut ini :



ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Reformasi birokrasi dan pemerintahan yang baik, tertib, melayani, berkualitas, bersih dan berwibawa,
2. Mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Pidie yang telah ditentukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie telah merumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan mutu, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah usaha untuk pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan Pidie Troe, Meugoe dan Meulaot	Meningkatkan produktivitas sektor perikanan	Produksi Perikanan (ton)	27.903	30.414	33.131	36.135	39.387
			Konsumsi Ikan (kg/thn/kapita)	41,76	43,01	44,30	45,63	47,00
			Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	4,62	5,08	5,59	6,15	6,76
			Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	53	54	56	59	62
			Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	15.867,39	17.454,13	19.199,54	21.119,50	23.231,45
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	87,96	89,41	92,11	93,50	94,81



### **BAB III**

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

##### **A. Definisi Indikator Kinerja**

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja adalah hasil kerja keras/perilaku berkarya/hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan misi, dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

##### **B. Metode penentuan Indikator Kinerja**

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan tersebut.

##### **C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja**

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria "SMART" yaitu :

#### Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. **Specific**, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. **Measurable**, yaitu dapat diukur / diquantifikasi secara obyektif.
3. **Achievable**, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. **Relevant**, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
5. **Time-Bound**, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

#### D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie sebagai komponen pemerintah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/ dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan urusan pembantuan yang diberikan kepada daerah;
3. Fungsi :
  - a. Merumuskan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Melaksanakan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
  - d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	SUMBER DATA
Meningkatkan produktivitas sektor perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	Satu Data KKP
	Produksi Perikanan kelompok nelayan (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$	Satu Data KKP
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Klp)	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100\%$	Satu Data KKP
	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan Perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Satu Data KKP
	Jumlah nilai tukar nelayan (NTN)	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$	Satu Data KKP
	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (kg)}}{\text{Target Daerah (kg)}} \times 100\%$	Satu Data KKP

Sigli,      Maret 2021  
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Kabupaten Pidie

  
 Ir. H. M. HASAN YAHYA, MM  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19611201 199203 1 002